

Perbaiki BPJS ala Trump

Hilmi Sulaiman Rathomi

Dosen FK Universitas Islam Bandung
Direktur Clarity for Development



KEBLJAKAN pertama Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat amat menarik. Hanya selang beberapa jam setelah dilantik, Trump langsung menandatangani *executive order* pertamanya, yakni memerintahkan seluruh jajaran pemerintah federal melakukan segala upaya yang bisa ditempuh demi menghentikan Obamacare. Trump seakan ingin menegaskan bahwa program yang berseberangan dengan ideologi Negeri Paman Sam, seperti Obamacare, harus direformasi dan ditata ulang.

Obamacare, yang lebih tepat disebut sebagai Affordable Care Act, adalah program yang diklaim Presiden Obama sebagai keberhasilan terbesar sepanjang pemerintahannya. Program ini serupa dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, berupa asuransi wajib bagi warga Amerika Serikat khususnya yang selama ini tidak memiliki jaminan kesehatan.

Kelemahan Obamacare

Ide untuk menjam in seluruh penduduk dengan jaminan sosial memang cukup asing bagi mayoritas warga Amerika Serikat yang berideologi libe-

ral. Adanya asuransi yang bersifat wajib, berpremi rendah, dan disubsidi oleh pemerintah, amat bertentangan dengan paham *free market* yang berlaku di Amerika Serikat. Dampak negatif dari program ini amat mirip dengan yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia, seperti adanya beban subsidi premi yang besar, pengeluaran kesehatan yang melonjak tajam, kualitas layanan kesehatan yang turun, serta melemahnya industri asuransi komersial.

Bagi orang Amerika Serikat, kelemahan-kelemahan tersebut amat krusial. Dengan mayoritas warga yang memiliki daya beli besar, penduduk Amerika Serikat merasa berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi sesuai keinginan mereka. Paradigma liberalisme yang menekankan pada pemenuhan hak pribadi, menjadi pijakan bagi Trump untuk melakukan reformasi sistem kesehatan yang telah dirintis Obama. Trump menginginkan kembalinya *free market healthcare industry*.

Skenario Obamacare dituding Trump telah membuat biaya melambung karena tidak

adanya kompetisi antarpenyedia layanan asuransi. Program ini juga disinyalir membentuk pola pikir yang salah pada rakyat Amerika Serikat sehingga lebih bergantung pada program-program jaminan pemerintah dan cenderung menyalahgunakannya. Hal tersebut terbukti dari banyaknya golongan tua, yang notabene rawan sakit, yang mengikuti program ini, serta minimnya anak muda yang mau berpartisipasi. Kolapsnya beberapa perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat juga menjadi perhatian Trump, karena merupakan pertanda terganggunya perekonomian negara tersebut.

Pelajaran untuk BPJS

Program JKN-BPJS yang serupa Obamacare sama-sama terbukti memberikan beban berat bagi keuangan negara. Belanja kesehatan melonjak karena euforia masyarakat berobat, dan kualitas layanan menjadi turun karena membeledaknya jumlah pasien serta berbagai aturan yang dibuat BPJS untuk mengendalikan biaya. Bagi masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan asuransi komersial atau skema *fee for service*, hal ini tentu amat mengecewakan.

Perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal ideologi membuat semua kelemahan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan harus dihentikannya JKN-BPJS di Indonesia. Golongan fakir miskin tidak bisa dianggap se-

bagi beban di negara ini. Oleh karena itu, alih-alih meniru kebijakan Trump menghentikan Obamacare, kita dapat mengambil hal positif dari apa yang dicetuskan Trump untuk perbaikan program JKN-BPJS.

Pertama, mendorong adanya kompetisi yang sehat. Keberadaan badan penyelenggara jaminan selain BPJS perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Adanya badan alternatif akan menimbulkan persaingan dalam hal peningkatan layanan kepada peserta serta benefit bagi fasilitas dan tenaga kesehatan. Ide ini juga berpotensi menjawab kekecewaan para tenaga medis terhadap rendahnya tarif yang dipatok BPJS dengan dalih kendali biaya. Hanya adanya satu badan tunggal menyebabkan tenaga medis tidak memiliki daya tawar karena kendali pasar ada di tangan BPJS.

Kedua, mengatasi penyebab mendasar tingginya beban negara. Dalam skema Obamacare, salah satu penyebab tingginya beban keuangan negara disebabkan pemerintah harus menanggung biaya kesehatan untuk para imigran ilegal dan meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk dalam skema Medicaid (asuransi khusus masyarakat miskin Amerika Serikat). Untuk itu, Trump menekankan pentingnya penegakan UU imigrasi untuk mengurangi imigran ilegal dan memprioritaskan pembukaan lapangan kerja demi memang-

kas jumlah penduduk miskin yang membebani subsidi premi Medicaid. Hal serupa seharusnya dapat dilakukan di Indonesia, di mana pemerintah wajib mengupayakan penduduk yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) makin berkurang jumlahnya. Pemerintah harus fokus pada ketepatan pendataan penduduk miskin, bukan membanggakan peningkatan jumlah PBI yang berujung pada tingginya beban subsidi premi. Untuk itu, upaya penciptaan lapangan kerja dengan mendatangkan investasi dan meningkatkan keterampilan kerja merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.

Ketiga, meningkatkan kewenangan pemerintah daerah. Seperti halnya Trump yang memberikan kewenangan lebih besar bagi negara bagian dalam mengelola Medicaid, pemerintah pusat juga bisa mendorong pemerintah daerah agar bertanggung jawab terhadap PBI di daerahnya. Hal ini selaras dengan gagasan sebelumnya untuk lebih mementingkan ketepatan sasaran, dibandingkan menambah jumlah penduduk yang disubsidi namun salah sasaran. Pemerintah daerah yang dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat miskin di wilayahnya, seharusnya lebih mampu melakukan pendataan yang akurat sehingga dana rakyat dimanfaatkan secara tepat. Semoga segera ada langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. ***